

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH
SULAWESI UTARA**

Oleh:

**SITI RIANI CLAURENZA POLONTALO
NIM. E11.16.112**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH SULAWESI UTARA

Oleh:

SITI RIANI CLAURENZA POLONTALO
NIM. E11.16.112

SKRIPSI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
.....2022

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE, Ak, M.Si
NIDN: 0914027902

Pembimbing II



Shella Budilawan, SE, M.Ak
NIDN: 0921089202

HALAMAN PERSETUJUAN

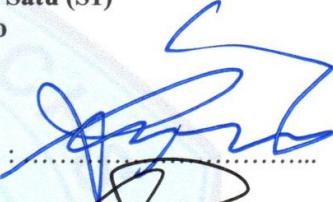
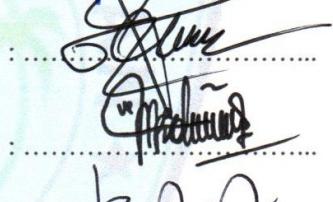
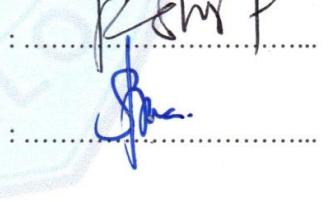
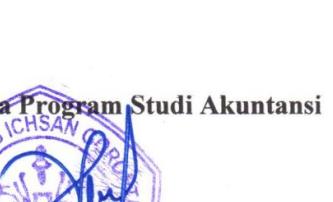
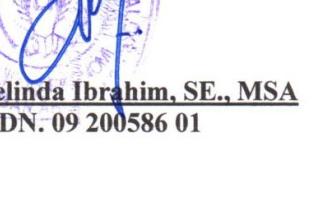
ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

OLEH :

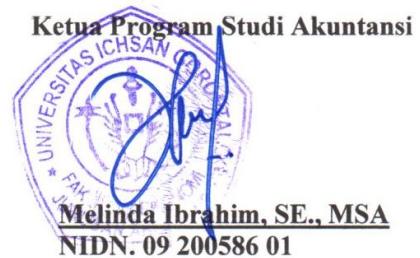
SITI RIANI CLAURENZA POLONTALO

E.11.16.112

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. DR. Rahmisyari, SE., MM
(Ketua Penguji) 
2. Reyther Biki, SE., M.Si
(Anggota Penguji) 
3. Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak
(Anggota Penguji) 
4. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
(Pembimbing Utama) 
5. Shella Budiawan, SE., M.Ak
(Pembimbing Pendamping) 

Mengetahui,



ABSTRACT

SITI RIANI CLAURENZA POLONTALO. E1116112. ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT'S FINANCIAL PERFORMANCE DEVELOPMENT OF NORTH SULAWESI PROVINCE GOVERNMENT

This study aims to find out and analyze the financial performance development of the Manado City Government. The analytical technique used is descriptive quantitative by employing ratio analysis. The data in this study is the secondary data sourced from the Manado City Government through the publication website. The results show that the ratio in 2019, 2020, and 2021 where the degree of decentralization of the Manado City Government indicated a relatively low value. The regional financial dependence on funds from the central and provincial governments implied a relatively high level. On the other side, the level of regional independence criteria illustrated a decrease. The compatibility of regional spending looked more dominated by operational expenditures than capital expenditures. With the amount of Locally-Generated Revenue which was still low, positive values still occurred in 2021. The main factor causing the ratio value to fluctuate with the lowest ratio value in 2020 was the Covid-19 pandemic condition leading to limited community activities. It greatly affected the purchasing power and economic turnover of the City Manado. The lack of visitors or consumers in both the service and trade sectors had made a decrease in the value of Manado City's Locally-Generated Revenue in 2020. The value of consumptive spending in 2020 also experienced a significant increase compared to capital expenditures. It was due to a budget shift policy more oriented towards controlling Covid-19 in 2020 and 2021. So, in 2021, the ratio value of each measurement indicator again showed a positive value compared to 2020. It was a sign of economic improvement during the economic recovery period during the covid-19 pandemic.

Keywords: Financial Performance Development, Manado City Government



ABSTRAK

SITI RIANI CLAURENZA POLONTALO. E1116112. ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Rasio. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang berusumber dari Pemerintah Kota Manado yang diperoleh dari situs website publikasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa rasio tahun 2019, 2020 dan 2021 dimana Derajat desentralisasi Pemerintah Kota Manado masih tergolong rendah, Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat dan provinsi masih tergolong tinggi, tingkat kemandirian daerah yang masih tergolong dalam kriteria kurang, dan keserasian belanja daerah yang lebih didominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal. Dengan jumlah PAD yang masih rendah, tapi nilai positif masih terjadi ditahun 2021. Faktor utama penyebab nilai rasio mengalami fluktuasi dengan nilai rasio terendah tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemic Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat dibatasi dan sangat berpengaruh terhadap daya beli dan perputaran ekonomi Kota Manado. Sepinya pengunjung atau konsumen baik sector jasa dan perdagangan menyebabkan nilai PAD Kota Manado tahun 2020 mengalami penurunan dan nilai belanja konsumtif di tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang signifikan dibanding belanja modal, karena adanya kebijakan pergeseran anggaran yang lebih berorientasi pada pengendalian Covid 19 pada tahun 2020 dan tahun 2021. Sehingga tahun 2021 nilai rasio dari masing-masing indicator pengukuran Kembali menunjukan nilai positif disbanding tahun 2020, sebagai tanda adanya perbaikan ekonomi dalam masa pemulihan ekonomi dimasa pandemic covid-19.

Kata kunci: perkembangan kinerja keuangan, pemeritah kota Manado



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantuman sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 16 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Siti Riani Claurenza Polontalo

KATA PENGANTAR

Asalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamadulillah Dan Rasa Syukur Yang Sebesar – besarnya Kepada Allah Swt. Atas Segala Rahmat Dan Karunia-Nya Dalam Setiap Langkah Yang Dihadapi Penulis. Serta Shalawat Dan Salam Untuk Rasul Kita Nabi Muhammad Saw. Dimana akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Pada Universitas Ichsan Gorontalo. Dengan Judul **“Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Sulawesi Utara.”**

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwasan masih banyak terdapat kekurangan dan tanpa bantuan dari berbagai pihak, ini tidak dapat diselesaikan. Namun apabila dalam penulisan ini masih ada kesalahan, dengan kerendahan hati penulis menerima dan mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dan memohon maaf sebesar-besarnya. Atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku ketua Yayasan Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir., SE.,M, Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Melinda Ibrahim, SE.,MSA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE.Ak, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Shella Budiawan, SE, M.Ak selaku

Pembimbing II, serta Bapak Dan Ibu Dosen dalam lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta senantiasa mengarahkan Penulis, khususnya dalam Penulisan Skripsi ini.

Semoga segala bantuan serta dukungan berbagai pihak akan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan Skripsi ini. Dan semoga segala bantuan dan dukungan akan bernilai Ibadah Disisi-Nya. Amiiin.

Gorontalo, 04 Juni 2022

Siti Riani Claurenza Polontalo

DAFTAR ISI

Halam Judul	i
Halaman pengesahan Pembimbing	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Masalah	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA PIKIR	
2.1 Kajian Pustaka	8
2.1.1 Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah	8
2.1.2 Analisis Laporan Keuangan	14
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.1.4 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	30
3.2 Metode Penelitian	30
3.2.1 Desaian Penelitian	30
3.2.2 Oprasional Variabel Penelitian	30
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.4 Prosedur Pengumpulan Data	31
3.5 Rencana Penelitian	32
3.5 Metode Analisis	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Objek Penelitian	36
4.2 Hasil Penelitian	39
4.3 Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
Dafatar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	: Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Provinsi Manado.....	5
Tabel 2-1	: Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	25
Tabel 3-1	: Operasional Variabel X.....	31
Tabel 3-2	: Rencana Penelitian.....	32
Tabel 3-3	: Skala Interval Kemandirian Keuangan	34
Tabel 4-1	: Rasio Derajat Desentralisasi	40
Tabel 4-2	: RAsio Ketergantungan Keuangan Daerah	42
Tabel 4-3	: RAsio Kemandirian Daerah	45
Tabel 4-4	: Rasio Belanja Operasi.....	46
Tabel 4-5	: RAsio Belanja Modal.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 : Kerangka pemikiran	27
Gambar 4-1 : Grafik Rasio Derajat Desentralisasi	41
Gambar 4-2 : Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	42
Gambar 4-3 : Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	44
Gambar 4-4 : Grafik Rasio Belanja Operasi.....	46
Gambar 4-5 : Grafik Rasio Belanja Modal	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya dalam mendorong terciptanya pengelolaan pemerintahan yang memenuhi prinsip *good governance* adalah menjamin tata pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik serta patuh dan taat terhadap perundangan, kebijakan anggaran yang berorientasi pada kemajuan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan, yang pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Kesemuanya itu dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat yang sama-sama memiliki peran penting dalam melaksanakan dan mengawasi jalannya penngelolaan pemerintahan.

Prinsip pengelolaan keuangan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah didalam mengelola dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki daerah diharapkan mampu memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program-program disusun sedemikian rupa yang didasarkan pada apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat, dimana kesemuanya itu tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran pendapatan daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai program dan aktivitas pemerintah dan evaluasi

didalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik kedepannya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kinerja pekerjaan sektor keuangan di suatu daerah melalui penggunaan sistem keuangan yang ditentukan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk beberapa periode. Ada beberapa aspek pengukuran kinerja yang biasanya ingin diukur oleh organisasi termasuk: aspek keuangan, kepuasan pelanggan, operasi dan bisnis internal, kepuasan karyawan, kepuasan kota/pemangku kepentingan, dan waktu. Namun, aspek keuangan ini sangat penting untuk diperhitungkan ketika mengukur kinerja, sehingga situasi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. Aspek keuangan termasuk anggaran dan arus kas“ (Bastian, 2006:276).

Salah satu cara didalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan teknik analisis tertentu seperti rasio keuangan. “Analisis rasio keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dalam satu periode dengan periode sebelumnya untuk melihat bagaimana tren yang berkembang. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai perbandingan antara metrik yang dimiliki oleh suatu pemerintah dengan metrik keuangan lain dari pemerintahan berikutnya atau yang memiliki potensi daerah yang relatif sama untuk melihat bagaimana posisi metrik keuangan daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya“ (Halim, 2008:232).

Tedapat beberapa rasio keuangan yang didapat digunakan untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah Rasio Derajat Desentralisasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Analisis Keserasian Belanja (Mahmudi, 2010:142). Penggunaan terhadap rasio-rasio tersebut diharapakan mampu menggambarkan kondisi daerah tentang tingkat kemandirian keuangan daerah dan aspek aktivitas belanja pemerintah daerah. Sehingga hal ini menjadi tolak ukur pemerintah daerah itu sendiri atas prestasi kerjanya setiap periode, serta sejauhmana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah didalam menggali potensi sumber daya yang dimiliki serta orientasi penggunaanya.

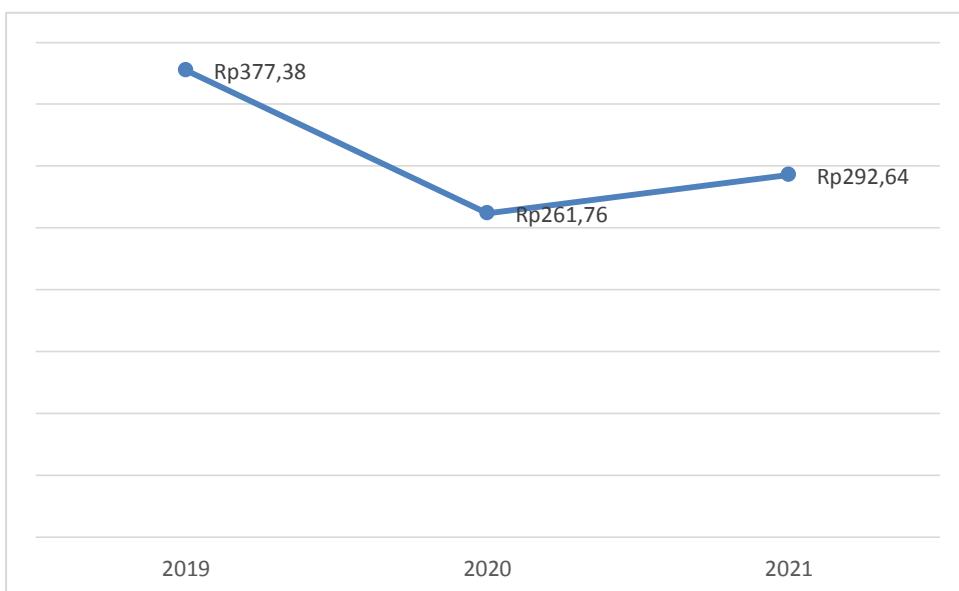
Kota Manado merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, yang tidak lain tujuannya adalah menjadi daerah yang mandiri dan berkembang serta menjadi daerah maju diwilayah Sulawesi bagian utara. Oleh karean itu pemeritah Kota Manado bekerja keras didalam membangun daerah dan berupaya menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perjalanannya, program kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Kota Manado tentu membutuhkan sumber pendanaan baik bersumber dari internal daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun bersumber dari luar seperti transfer dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan yang sah.

Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado berperan penting didalam meningkatkan kemampuan daerah didalam membiayai daerahnya

sendiri dan mengurangi tingkat ketergantungannya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga tingginya Pendapatan Asli Daerah menunjukan daerah tersebut adalah daerah yang maju dan memiliki iklim ekonomi yang berlaku dimasyarakat. Selain itu juga, besarnya sumber pendapatan daerah harus digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan program kerja yang direalisasikan dalam bentuk belanja daerah dengan tujuan pembangunan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada pengelolaan belanja tersebut harus dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip efektif, efisien dan ekonomis.

Oleh karena itu, sampai sejauh mana pencapaian ekonomi pemerintah Kota Manado yang telah direalisasikan, secara umum tergambar dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah Kota Manado dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, dimana selama tiga tahun terakhir, yakni periode 2019, 2020 dan 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 1.1
Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Manado
(Dalam Miliaran Rupiah)



Sumber: Laporan Realiasi APBD Tahun 2019-2021 Kota Manado

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukan nilai rasio yang mengalmaifluktasi dengan kecenderungan penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 menunjukan nilai perolehan PAD yang lebih rendah dibandingkan tahun 2019, walaupun tahun 2021 kembali mengalami peningkatan, tetapi angka tersebut masih realtif kecil peningkatannya dibandingkan tahun 2020 dan pencapaihan PAD tahun 2019.

Oleh karena itu, gambaran pendapatan daerah Kota Manado menunjukan kemampuan pemerintah didalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien. Rendahnya pertumbuhan anggaran pendapatan daerah terutama PAD Kota Manado tahun 2020 dan 2021 jika dibandingkan tahun 2019 dapat mengakibatkan pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan tambahan dari luar. Kondisi ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Manado terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan gambaran fenomenda di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado dengan judul penelitian : **Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Sulawesi Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimakah perkembangan kinerja keuangan pemerintah Kota Manado ?.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu gambaran data analisis tentang pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado untuk tahun 2019 – 2021.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Untuk Praktisi (empiris)

Sebagai masukan bagi instansi Pemerintah Kota Manado dalam hal pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah khususnya dengan pendekatan rasio keuangan.

2. Untuk Akademisi

Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik dan memahami lebih mendalam tentang penerapan ilmu pengetahuan pada tatanan teori dan aplikasinya, serta sebagai refrensi bagi pihak lain yang

tertarik dengan kajian mengenai pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum, menurut Karti (2012:4) bahwa “laporan keuangan merupakan media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan”. Sedangkan pengertian laporan keuangan pemerintah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 yaitu “laporan terstruktur tentang kondisi keuangan dan Transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. unit pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih unit akun, yang menurut ketentuan perundang-undangan ada kewajiban untuk melaporkan Pertanggungjawaban berupa laporan keuangan untuk tujuan umum, terdiri dari: oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, setiap kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan organisasi di daerah sekitarnya pemerintah pusat/daerah atau organisasi lain jika menurut peraturan Unit organisasi tersebut wajib melapor berdasarkan ketentuan perundang-undangan keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan komposisi kekayaan suatu entitas serta laporan tentang aktivitas suatu entitas baik mencakup kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan operasional, yang dilaksanakan setiap tahun

periode yang nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pencapaian target efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber kekayaan daerah.

2.1.1.2 Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010:4) secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Adapun tujuan laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yakni “laporan keuangan pemerintah diharapkan menggambarkan informasi yang berguna bagi meraka yang membutuhkan untuk dapat dilakukan pengukuran terhadap nilai akuntabilitas dalam upaya menjadi perimbangan dalam proses pengambilan kebijakan baik ekonomi, social, maupun politik dengan :

1. Memberikan informasi seputar sumber, alokasi dan realisasi sumber daya keuangan;
2. Memberikan informasi seputar ketersediaan sumber dana untuk periode tertentu dalam membiayai sumber pengluaran
3. Memberikan infomrasi seputar besarnya sumber daya yang direalisasikan pada setiap aktivitas entitas pelaporan serta orientasi pada hasil dan pencapaian.

4. Memberikan informasi seputar laporan pendanaan entitas didalam memenuhi kebutuhan pendanaan dalam setiap kegiatan-kegiatan dan aktivitas entitas.
5. Memberikan informasi seputar kondisi keuangan serta entitas yang berhubungan dengan sumber penerimaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik bersumber dari pinjaman dan pengutan pajak
6. Memberikan informasi seputar setiap perkembangan kondisi keuangan entitas pelaporan, baik dalam kondisi kenaikan maupun penurunan dalam beberapa periode berjalan.

Sedangkan fungsi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yakni “laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*), evaluasi kinerja.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa “komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- c. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

- d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintahpusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periodepelaporan

e. Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas memberikan informasi seputar kegiatan operasi pendanaan, transitoris, investassi yang menyajikan saldo awal, pengeluaran dan peneirmaan serta saldo kas akhir pada beberapa periode tertentu baik pemerintah pusat maupun daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Ekuitas menggambakan informasi peningkatan atau penurunan nilai modal tahun pelaporan jika dibandingkan dengan priode sebleumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mencakup seuang nilai atau angka yang tercantum dalam laporan realiasi anggaran, laporan SAL perubahan, LO, Laporan Neraca, Arus Kas dan Perubahan Ekuitas yang diwajikan dan disarangkan untuk dijelaskan lebih lanjut pengungkapannya berdasarkan satandar akuntansi yang berlaku.

2.1.1.4 Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan kuangan, sebagaiman dijelaskan oleh Mahmudi (2010:2) sebagai berikut:

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-

unit kerja didalamnya (SKPD). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemda dan DPRD.

2. Dari sisi pemaki eksternal, laporan keuangan pemrintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Karena laporan keuangan diguanakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan mamadai (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Menurut Mahmudi (2010:3) dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan inforamsi tersebut untuk :

1. Mebandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran)
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran

3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait
4. Mengatahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

2.1.2 Analisis Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Analisis Laporan Keuangan

Manurut Kasmir (2013:66) analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha secara rinci lebih mendalam, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan mampu mencakapi target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Menurut Sunyoto (2013:9) analisis laporan keuangan merupakan suatu proses dan penilaian yang dapat bermanfaat dalam memberikan jawaban dalam setiap pertanyaan yang diajukan secara wajar, serta merupakan alat untuk proses pencapaian tujuan. Darsono dan Ashari (2005:51) menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan juga menjelaskan berbagai informasi sehubungan data laporan keuangan. Proses analisis dilakukan pada masing-masing item akun dalam laporan keuangan untuk dilakukan penilaian seberapa baik perusahaan dalam beroperasi.

Hanafi dan Halim (2009:49) mengemukakan laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.

2.1.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2008:16), analisis laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Bisa menyajikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari pada laporan keuangan pada umumnya.
2. Bisa memperoleh informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) pada suatu pelaporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (*impilisit*).
3. Bisa memperoleh informasi suatu kesalahan yang terkandung didalam laporan keuangan.
4. Bisa mengungkap peri hal yang tidak sesuai dalam hubungan dengan suatu laporan maupun dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Bisa memperoleh informasi seputar sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat dilapangan seperti untuk prediksi dan peningkatan (*rating*).
6. Bisa menyajikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil kebijakan.
7. Bisa memberikan penilaian peringkat (*rating*) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam kriteria bisnis.
8. Bisa memberikan penilaian situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.

9. Bisa memberikan pemahaman terhadap situasi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan perusahaan, hasil usaha, struktur keuangan dan sebagainya.
10. Dapat dijadikan alat untuk memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan dimasa yang akan datang.

Tujuan perusahaan dalam menganalisis laporan keuangan didefinisikan sebagai target atau hasil akhir yang ingin dicapai dimana seluruh kegiatan perusahaan diarahkan untuk mencapai target atau tujuan akhir tersebut. Sedangkan strategi bisa diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut tergantung dari misi perusahaan. Tetapi pada umumnya tujuan tersebut sifat ekonomis dan nonekonomis, ekonomis adalah memperoleh keuntungan mencapai tujuan tersebut, bisa digunakan strategi yang berbeda-beda.

2.1.2.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Prastowo & Juliati (2002:54) secara umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Teknik Analisis Horizontal

Teknik analisis horizontal (dinamis) merupakan metode analisis dengan mebandingkan antara informasi laporan keuangan untuk beberapa periode tertentu untuk memperoleh infomasi kecenderungan dan perkembangannya.

2. Teknik Analisis Vertikal (Dinamis)

Teknik analisis vertikal (statis) merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan untuk periode tertentu

membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Disebut Metode Statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama.

Menurut Harahap (2008:423) mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis teknik analisa laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Teknik-teknik tersebut antara lain:

1. Analisa Komparatif adalah teknik analisa laporan keuangan dengan cara membandingkan unsur-unsur dalam laporan neraca dan laba rugi dari tahun ketahun sebelumnya guna mengetahui pertumbuhan/perubahan setiap komponen serta penyebabnya.
2. Analisa *Common Size* merupakan analisa bentuk awam dengan cara mengubah nilai setiap komponen secara dalam laba rugi perusahaan dalam bentuk persentase guna mengetahui komposisi setiap komponen yang dibandingkan dengan komponen lainnya dalam laporan keuangan.
3. Analisa Indeks Berseri merupakan teknik analisa yang diarahkan untuk untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun setiap komponen laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi berdasarkan tahun dasar.
4. Analisa/Trend merupakan teknik analisa yang diarahkan untuk memproyeksikan pertumbuhan setiap komponen pada laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi berdasarkan pertumbuhan komponen lainnya dalam kedua laporan keuangan tersebut.
5. Analisa Rasio adalah merupakan teknik analisa dengan cara membandingkan dari satu pos dengan pos lain yang mempunyai hubungan yang relevan dan

signifikan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui rasion likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, *capital market, growth*.

6. Analisa *Dupont* merupakan teknik analisa yang dikembangkan oleh *Dupont*. Analisa ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih intgratif dan menggunakan komponen laporan keuangan sebagai elemen analisanya, dengan menguraikan hubungan pos-pos laporan keuangan cara mendetail.
7. Analisa Break Even Point merupakan teknik analisa *Cost Volume Profit*. Hal ini dilakukan dengan mencoba mencari dan emnganilisis aspek hubungan antara besarnya investasi dan besarnya volume rupiah yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu.
8. Analisa *Gross Profit* merupakan teknin analisis yang diarahkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya dalam kaitannya dnegan perolehan *gross profit*.
9. Analisa *Z-Score* merupakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Edward I Altman di New York University. Teknik ini diarahkan untuk mengetahui tentang kekuatan keuangan perusahaan dengan suatu model diskriminan untuk meprediksi kebangkrutan perusahaan.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangna Pemerintah Daerah

Menurut Mulyadi (2009:34) kinerja adalah suatu hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Penilaian kinerja merupakan penentuan efektivitas secara periodik atas aktivitas operasional suatu entitas, personilnya, setiap bagian

organisasi yang disesuaikan dengan standar, kriteria dan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hidayat dan Ghazali (2013) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan”.

Menurut Bastian (2006:276) bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kinerja pekerjaan sektor keuangan di suatu daerah melalui penggunaan sistem keuangan yang ditentukan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk beberapa periode. Ada beberapa aspek pengukuran kinerja yang biasanya ingin diukur oleh organisasi termasuk: aspek keuangan, kepuasan pelanggan, operasi dan bisnis internal, kepuasan karyawan, kepuasan kota/pemangku kepentingan, dan waktu. Namun, aspek keuangan ini sangat penting untuk diperhitungkan ketika mengukur kinerja, sehingga situasi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. Aspek keuangan termasuk anggaran dan arus kas

2.1.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2013:21) analisis kinerja keuangan merupakan upaya untuk mengidentifikasi karakteristik keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam APBD, adalah analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2010:88) Analisis rasio keuangan adalah suatu teknik perbandingan angka dan data yang diperoleh dari elemen dalam laporan keuangan atau mebandingkan dari tahun ke tahun atas perkembangan kinerja organisasi lain sejenis.

Tedapat beberapa rasio keuangan yang didapat digunakan untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurut Mahmudi (2010:142) adalah sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Adapun standar rasio untuk rasio derajat desentralisasi (Tan, 2010) yakni sebagai berikut :

1. Rasio antara 0,00% s/d 10% masuk kriteria sangat kurang
 2. Rasio antara 10,1 s/d 20% masuk kriteria kurang
 3. Rasio antara 20,1% s/d 30% masuk kriteria sedang
 4. Rasio antara 30,1% s/d 40% masuk kriteria cukup
 5. Rasio antara 40,1% s/d 50% masuk kriteria baik
 6. Rasio di atas 50% masuk kriteria sangat baik.
- b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

- c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah Pendapatan Transfer dari pemrintah pusat, propinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dapat digambarkan dalam rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Adapun standar rasio untuk rasio kemandirian keuangan daerah yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan

Kondisi Keuangan	Range Rasio Kemandirian	Kriteria Hubungan
Rendah Skali	1 - 25	Intruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Parstisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2001:168)

d. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah harus perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja belanja antara lain berupa:

1) Analisis belanja Operasi

Analisis rasio belanja dapat menyajikan kepada para pengguna laporan tentang besaran porsi realisasi belanja daerah yang direalisaikan untuk kegiatan belanja operasi. Dimana belanja operasi memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun, sehingga sifatnya jangka pendek dan rutin (berulang-ulang). Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan

dengan pemerintah daerah yang pendapatannya rendah. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2) Analisis belanja Modal

Analisis belanja modal merupakan analisis yang dapat menggambarkan besaran porsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Diaman belanja modal ditujukan untuk kegiatan investasi daerah, sehingga kegiatan belanja modal dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun. Pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang rendah cenderung memiliki tingkat belanja modal yang tinggi, sebab pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Adapun rumusnya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Untuk rasio keserasian belanja belum ada patokan yang pasti berapa besarnya standar Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan

pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.

Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi pembanding dengan penelitian sebelumnya yakni:

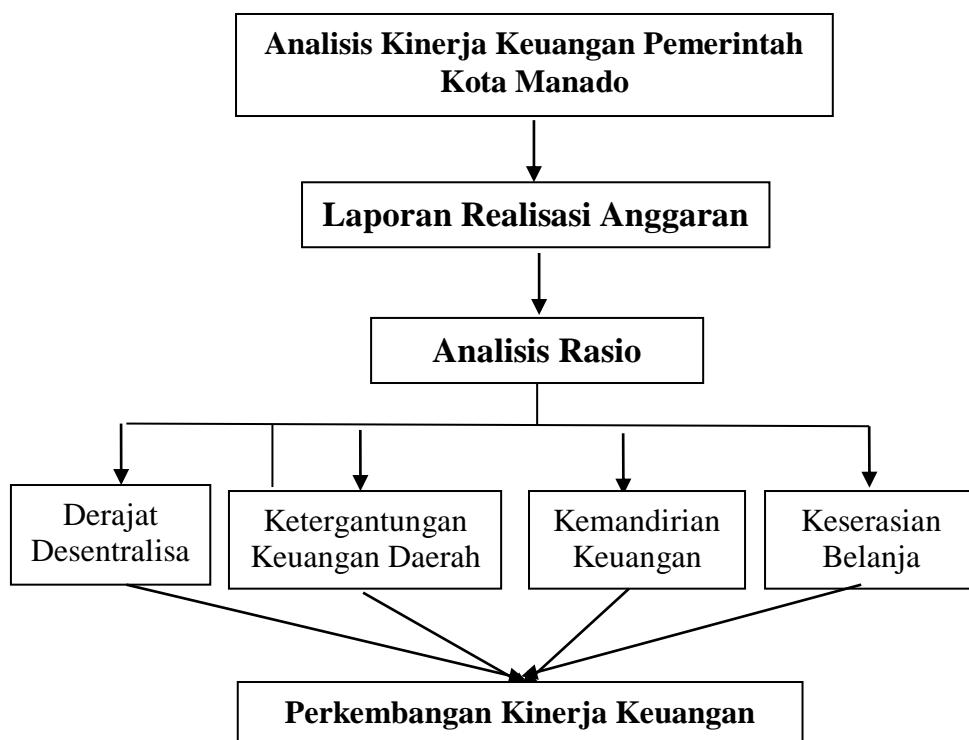
1. Joko Pramono (2014) tentang Analisis Metrik Keuangan Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kota Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta masih kurang pada aspek kemandirian dan keselarasan dengan rasio kemandirian sebesar 15,83% (2010) dan 22,44% (2011), sedangkan rasio belanja terhadap APBD 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio investasi terhadap APBD adalah 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan dana sangat efisien dan efektif dengan tingkat efektivitas 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan tingkat efisiensi 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). .). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yaitu 58,93%, pendapatan meningkat 19,92%. Beban usaha meningkat 14,58% dan belanja modal meningkat 61,03%. Kemampuan mengembalikan pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).
2. Ayu Febriyanti (2013) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. Hasil penelitian ini

menemukan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik berdasarkan analisis rasio keuangan. Pola hubungan kemandirian daerah Malang selama lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan yang mengungkapkan dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, dengan rata-rata rasio kemandirian daerah sebesar 13,56%. Pencapaian kuota kemerdekaan ini masih tergolong rendah. Rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2007-2011 masih didominasi oleh belanja rutin, dengan bagian terbesar disumbangkan oleh pos belanja pegawai. Harus ada keselarasan antara belanja rutin dan belanja pembangunan agar pembangunan daerah yang menjadi tujuan RPJMD Kota Malang dapat tercapai walaupun dilakukan secara bertahap.

3. Paramitha Sandy Mokodompit (2014) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukan kemampuan desentralisasi kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2011 dan 2012 masih sangat rendah yang berarti masih belum mampu untuk menjalankan proses desentralisasi. Keuangan pemerintah kota Kotamobagu masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota Kotamobagu pada tahun 2011 dan 2012 masih sangat rendah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian pustaka di atas maka secara keseluruhan penelitian ini dapat digamarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dari uraian latar belakang dan kerangka pemikiran pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan objek lokasi yang diteliti adalah Pemerintah Kota Manado.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kauntitatif. Metode tersebut digunakan dengan cara menggambarkan dan menganalisis suatu permasalahan yang nampak yang dikaji lebih mendalam berdasarkan satandar dan kriteria tertentu dengan menggunakan formulasi – formulasi tertentu.

3.2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data analisis mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado dengan menggunakan teknik analisis rasio baik rasio yang datanya bersumber dari APBD dan rasio-rasio yang datanya bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Kota Manado.

Dari uraian di atas, maka variabel penelitian dapat dioperasionalisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Varibel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Laporan Realisasi Anggaran	1. Rasio Derajat Desentralisasi 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 4. Rasio Keserasian Belanja	Rasio

Sumber : Mahmudi (2010)

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Studi ini bertujuan untuk memperoleh data–data keuangan pemerintah daerah khususnya hal – hal yang berkaitan dengan penilaian kinerja yang menggunakan metode analisis rasio. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah baik itu Laporan Realisasi Anggaran dan laporan pendukung lainnya. Sumber data diperoleh dari situs *web* resmi Pemerintah Daerah Kota Manado dan Portal Data DJPK Kementerian Keuangan RI.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengambilan data *web* resmi Pemerintah Daerah Kota Manado dan Portal Data DJPK Kementerian Keuangan RI. Selain itu, dilakukan juga studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari

dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah seperti dari literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.

3.5 Rencana Penelitian Penelitian

Peneliti memilih waktu pelaksanaan penelitian berdasarkan dimulainya verifikasi judul pada bulan Februari 2022, dimana rencana penelitian dapat digambarkan dalam table berikut:

Tabel 3.2
Rencana Penelitian

Kegiatan	Februari		Maret				April				Mei			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul														
Penyusunan & Bimbingan Proposal														
Ujian Proposal														
Revisi dan Pengumpulan Data														
Penyusunan Skripsi														
Konsultasi dan Bimbingan Skripsi														
Persetujuan dan Ujian Skripsi														

3.6 Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif dan analisis rasio keuangan daerah, yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada, kemudian menganalisis serta membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

a. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Adapun standar rasio untuk rasio derajat desentralisasi yakni :

1. Rasio antara 0,00% s/d 10% masuk kriteria sangat kurang
2. Rasio antara 10,1 s/d 20% masuk kriteria kurang
3. Rasio antara 20,1% s/d 30% masuk kriteria sedang
4. Rasio antara 30,1% s/d 40% masuk kriteria cukup
5. Rasio antara 40,1% s/d 50% masuk kriteria baik
6. Rasio di atas 50% masuk kriteria sangat baik.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Adapun standar rasio untuk rasio ketergantungan keuangan daerah yakni:

1. Rasio antara 0,00% s/d 10% masuk kriteria sangat kurang
2. Rasio antara 10,1 s/d 20% masuk kriteria kurang
3. Rasio antara 20,1% s/d 30% masuk kriteria sedang
4. Rasio antara 30,1% s/d 40% masuk kriteria cukup
5. Rasio antara 40,1% s/d 50% masuk kriteria baik
6. Rasio di atas 50% masuk kriteria sangat baik.

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Adapun standar rasio kemandirian keuangan daerah yaitu

Tabel 3.3
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Skali	2 - 25	Intruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Parstisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2001:168)

d. Analisis Keserasian Belanja

1) Analisis belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan rutin (berulang-ulang).

2) Analisis belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Belanja modal bersifat memberikan mafaat jangka menengah dan panjang. Belanja modal mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu menambah aset daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado sering disebut sebagai Manado. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini berpenduduk 408.354 jiwa pada sensus 2019, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Perkiraan populasi di Manado (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790.

Kota Manado terletak di ujung semenanjung utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis $124^{\circ}40' - 124^{\circ}50'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}30' - 1^{\circ}40'$ Lintang Utara. Iklim di kota ini adalah tropis dengan suhu rata-rata $24^{\circ} - 27^{\circ}\text{C}$. Curah hujan rata-rata adalah 3.187 mm/tahun dengan iklim terkering di bulan Agustus dan terbasah di bulan Januari. Radiasi matahari rata-rata adalah 53% dan kelembaban relatif $\pm 84\%$.

Luas lahananya 15.726 hektar. Manado juga merupakan kota pesisir dengan garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh daerah perbukitan dengan beberapa dataran rendah pesisir. Interval ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak tertinggi di Gunung Tumpa.

Saat ini mayoritas penduduk kota Manado adalah dari suku Minahasa karena wilayah Manado terletak di pedesaan/wilayah Minahasa. Penduduk asli Manado adalah sub suku Tombulu, terbukti dengan beberapa nama desa di

Manado yang berasal dari bahasa Tombulu, misalnya: Wenang (Pohon Wenang/Maha Wewenang - bahan untuk membuat Kolintang), Tumumpa (Bawah), Mahakeret (Teriak), Tikala Ares (Walak Ares Tombulu). , dimana kata "ares" berarti "dihukum"), Ranotana (air tanah), Winangun (dibangun), Wawonasa (wawoinasa - di atas yang diasah), Pinaesaan (tempat persatuan), Pakowa (pohon Pakewa), Teling (bulu/Bambu untuk alat yang dibuat), Titiwungen (yang digali), Tuminting (dari kata Ting-Ting: Lonceng, kata yang disisipkan -um- berarti menunjukkan kata kerja, maka Tuminting: membunyikan lonceng), Pondol (Tepi), Wanea (dari Wanua: berarti tanah) dll; Sedangkan daerah Malalayang adalah suku Bantik, suku lain yang ada di Manado saat ini adalah suku Sangir, suku Gorontalo, suku Mongondow, suku Arab, suku Babontehu, suku Talaud, suku Tionghoa, suku Siau dan suku Borgo. Karena banyaknya komunitas Arab Peranakan, keberadaan Kampung Arab yang terletak di lingkar dekat Pasar '45 masih bertahan hingga saat ini dan menjadi salah satu tujuan wisata religi. Ada juga orang Jawa, Batak, Makassar dan Minangkabau, orang Aceh.

Saat ini yang menjabat Walikota dan Wakil Walikota Manado adalah Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang, dengan Visi, Misi dan Program Kerja Manado sebagai berikut:

VISI :

MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI BERANDA SULAWESI UTARA DAN INDONESIA KE ASIA PASIFIK

MISI :

1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA KOTA MANADO;
2. PENGUATAN EKONOMI KOTA YANG BERTUMPU KEPADA INDUSTRI JASA, PERDAGANGAN, DAN PARIWISATA;
3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN KOTA, DAN PERLUASAN KONEKTIVITAS;
4. PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN;
5. PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR DAERAH;

RANGKUMAN PROGRAM :

1. Membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi.
2. Menyediakan perumahan layak huni yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Menata lingkungan sekitar menjadi indah dan nyaman, agar supaya produktivitas dan kreativitas meningkat.
4. Mengelola pasar secara profesional untuk kenyamanan penjual dan pembeli.
5. Pengelolaan Sampah yang baik dan profesional.
6. Memperkuat pelayanan dan pendataan kependudukan agar program-program penanggulangan kemiskinan dan program pemerintah lainnya tepat sasaran.
7. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan.
8. Meningkatkan kualitas pendidikan.

9. Melakukan revitalisasi infrastruktur fialan, drainase, penerangan umum, dll) dengan anggaran minimal 200 juta per lingkungan per tahun.
10. Penataan dan pembangunan taman termasuk fasilitas social dan fasilitas umum lainnya.
11. Penataan dan pengelolaan pekuburan umum.
12. Insentif bagi rohaniawan.
13. Bantuan sosial kepada lansia dari keluarga tidak mampu.
14. Penataan angkutan umum agar supaya masyarakat bisa mendapat sarana transportasi yang efisien dan nyaman.
15. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat

4.2 Hasil Penelitian

Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado adalah analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio dengan data-data yang berasal dari APBD dan realisasinya yang terungkap dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Daerah Kota Manado. Adapun pengukuran kinerja keuangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin

tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Berdasarkan formulasi rasio di atas dan data Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Manado (terlampir), maka derajat desentralisasi Kota Manado dapat dihitung sebagai berikut:

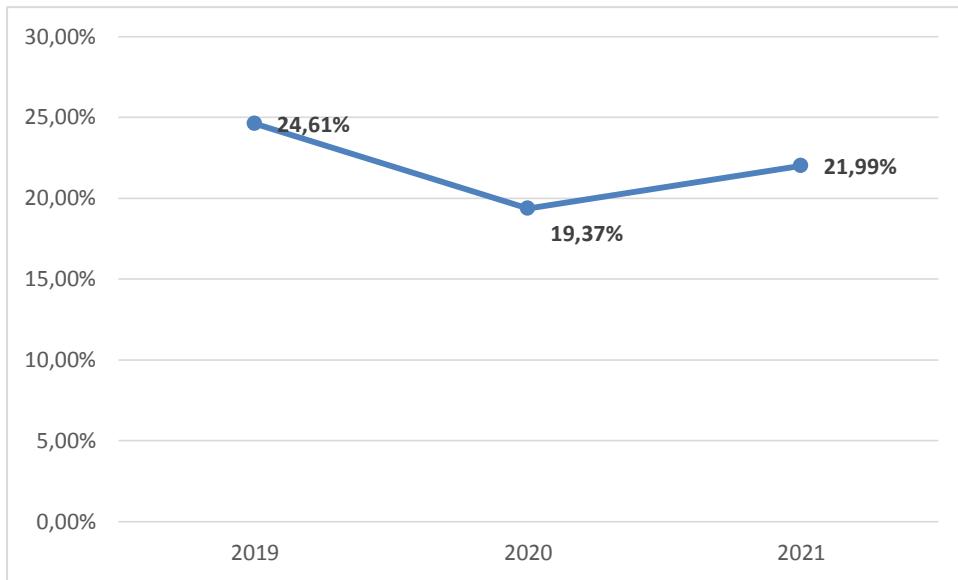
Tabel 4.1
Rasio Derajat Desentralisasi Kota Manado
(Dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio
2019	Rp 377.38	Rp 1,533.75	24.61%
2020	Rp 261.76	Rp 1,351.65	19.37%
2021	Rp 292.64	Rp 1,330.54	21.99%

Sumber: Hasil Olahan 2021

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai rasio derajat desentralisasi, untuk tahun 2019 sebesar 24,61%, tahun 2020 sebesar 19,37% dan tahun 2021 sebesar 21,99%. Hasil ini bila digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan tampak sebagai berikut:

Gambar 4.1
Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Kota Manado



Dari gambar grafik di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwasanya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi tren rasio derajat desentralisasi yang fluktuatif. Artinya dari total pendapatan daerah, setiap tahunnya kontribusi pendapatan asli daerah menunjukkan nilai yang fluktuasi dengan nilai terendah di tahun 2020 dan nilai tertinggi di tahun 2019.

b. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Berdasarkan formulasi rasio di atas dan data Laporan Realisasi Anggaran pada APBD Kota Manado (terlampir), maka tingkat ketergantungan daerah Kota Manado dapat dihitung sebagai berikut:

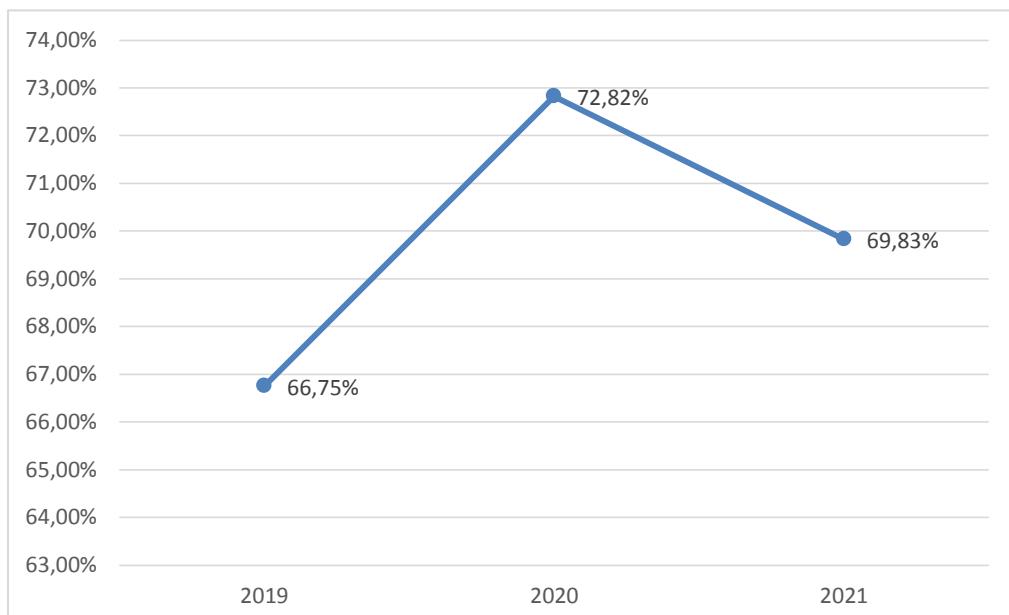
Tabel 4.2
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Manado
(Dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	Transfer Pusat	Total Pendapatan	Rasio
2019	Rp 1,023.72	Rp 1,533.75	66.75%
2020	Rp 984.24	Rp 1,351.65	72.82%
2021	Rp 929.09	Rp 1,330.54	69.83%

Sumber: Hasil Olahan 2022

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh data tentang nilai rasio kebergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat dan propinsi. Ditahun 2019 diperoleh nilai rasio sebesar 66,75%, ditahun 2020 sebesar rasionya yakni 72,82%, dan ditahun 2021 sebesar 69,83%.

Untuk itu, hasil rasio tingkat ketergantungan daerah bila digambarkan dalam bentuk rasio maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 4.2: Tingkat Ketergantungan Daerah Kota Manado

Dari gambar grafik di atas dapat dengan jelas diketahui tren tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi setiap tahunnya. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tren menunjukkan terjadi penurunan ditahun ke tiga yakni tahun 2021, namun demikian tahun 2020 menunjukkan nilai tertinggi tingkat ketergantungan keuangan daerahnya.

c. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah Pendapatan Transfer dari pemrintah pusat, propinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Dapat digambarkan dalam rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}}$$

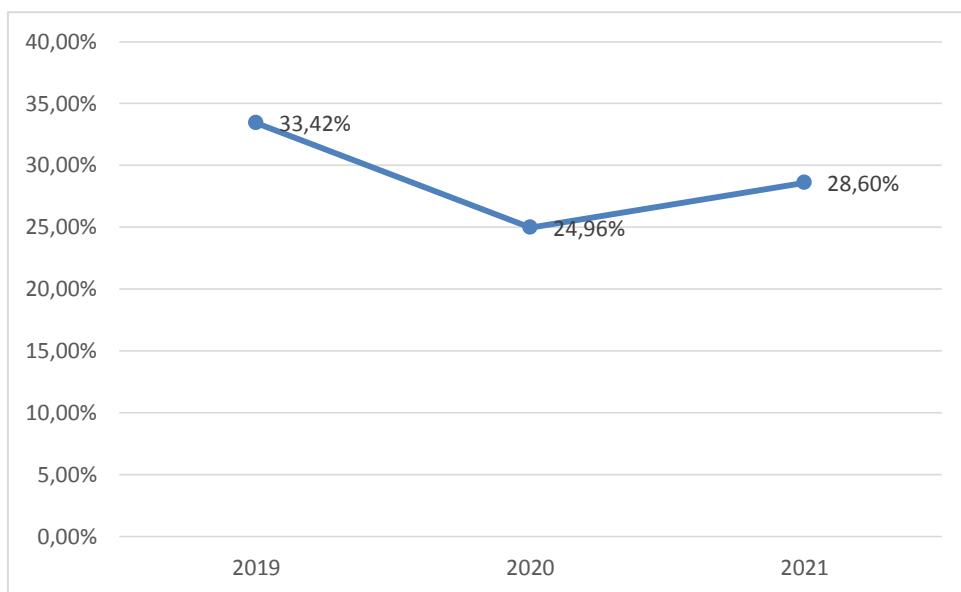
Berdasarkan formulasi di atas dan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (terlampir) maka tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rasio Kemandirian Daerah Kota Manado
(Dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer			Rasio
		Transfer Pusat	Transfer Antar Daerah	Jumlah	
2019	Rp 377.38	Rp 1,023.72	Rp 105.38	Rp 1,129.10	33.42%
2020	Rp 261.76	Rp 984.24	Rp 64.42	Rp 1,048.66	24.96%
2021	Rp 292.64	Rp 929.09	Rp 94.04	Rp 1,023.13	28.60%

Sumber: Hasil Olahan 2022

Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui besarnya rasio kemandirian daerah tahun 2019 adalah 33,42%, untuk tahun 2020 sebesar 24,96% dan tahun 2021 sebesar 28,60%. Berdasarkan hasil rasio tingkat kemandirian daerah Kota Manado kita dapat melihat besarnya tingkat kemandirian daerah dan kecenderuangan perkembangan tingkat kemandirian dapat digambarkan dalam gambar grafik berikut:



Gambar 4.3: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dari gambar grafik di atas, maka dengan jelas dapat diketahui bahwasanya tingkat kemandirian keuangan daerah setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang relatif mengalami peningkatan ditahun terakhir.

d. Rasio Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka

pemerintah daerah harus perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja belanja antara lain berupa:

3) Analisis belanja Operasi

Analisis rasio belanja dapat menyajikan kepada para pengguna laporan tentang besaran porsi realisasi belanja daerah yang direalisaikan untuk kegiatan belanja operasi. Dimana belanja operasi memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun, sehingga sifatnya jangka pendek dan rutin (berulang-ulang). Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang pendapatannya rendah. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

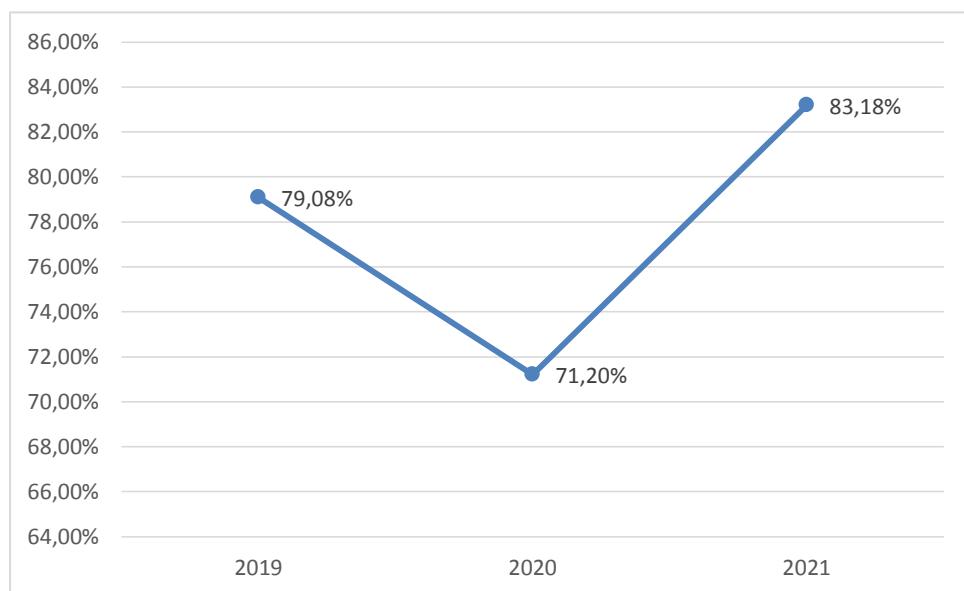
Berdasarkan formulasi di atas, maka rasio belanja operasi Pemerintah Kota Manado dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rasio Belanja Operasi
(Dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	Belanja Operasi				Rasio
	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Jumlah	Total Belanja	
2019	Rp 633.57	Rp 649.93	Rp 1,283.50	Rp 1,623.08	79.08%
2020	Rp 582.51	Rp 499.49	Rp 1,082.00	Rp 1,519.73	71.20%
2021	Rp 612.46	Rp 471.71	Rp 1,084.17	Rp 1,303.42	83.18%

Sumber: Olahan Data 2022

Berdasarkan table perhitungan rasio belanja operasi menunjukkan selama tiga tahun terakhir menunjukkan tahun 2019 sebesar 79.08%, tahun 2020 sebesar 71.20% dan tahun 2021 sebesar 83.18%. Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik yakni sebagai berikut:



Gambar 4.4: Rasio Belanja Operasi

Berdasarkan gambar grafik di atas, menunjukkan nilai belanja operasi mengalami fluktutif dengan kenaikan nilai rasio di tahun 2021, jika dibandingkan tahun 2020 yang menunjukkan nilai terendah selama tiga tahun terakhir.

4) Analisis belanja Modal

Analisis belanja modal merupakan analisis yang dapat menggambarkan besaran porsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Diaman belanja modal ditujukan untuk kegiatan investasi daerah, sehingga kegiatan belanja modal dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun.

Belanja modal tidak bersifat rutin tetapi belanja modal mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu menambah aset daerah. Pemerintah daerah dengan pendapatan daerah yang rendah cenderung memiliki tingkat belanja modal yang tinggi, sebab pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Adapun rumusnya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

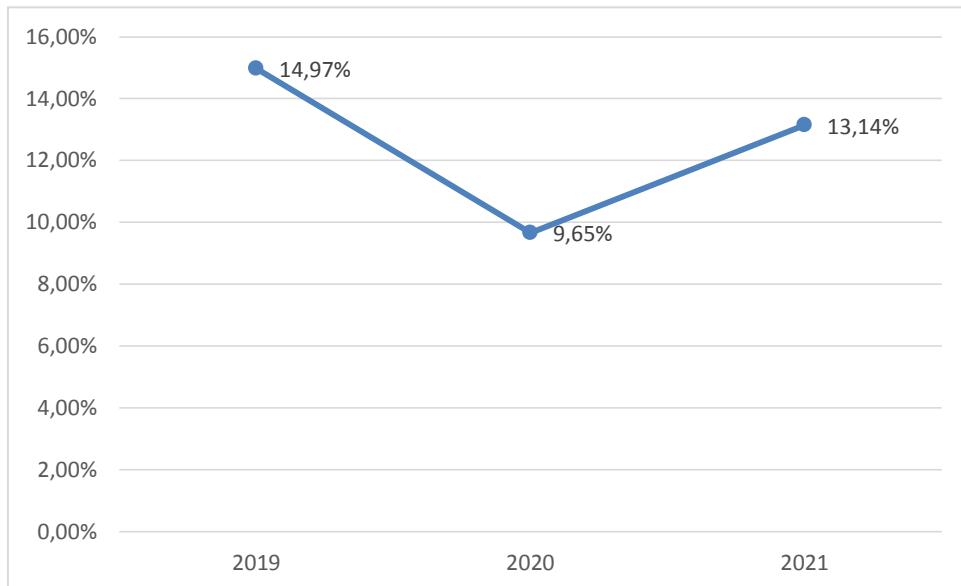
Berdasarkan formulasi diatas, maka dapat dihitung besarnya rasio belanja operasi dan belanja modal pemerintah Kota Manado sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rasio Belanja Modal Kota Manado
(Dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio
2019	Rp 242.93	Rp 1,623.08	14.97%
2020	Rp 146.70	Rp 1,519.73	9.65%
2021	Rp 171.27	Rp 1,303.42	13.14%

Sumber: Olahan Data 2022

Berdasarkan table perhitungan rasio belanja modal menunjukkan selama tiga tahun terakhir menunjukkan tahun 2019 sebesar 14.97%, tahun 2020 sebesar 9.65% dan tahun 2021 sebesar 13.14%. Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik yakni sebagai berikut:



Gambar 4.5: Rasio Belanja Modal

4.3 Pembahasan

4.3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Ditinjau Dari Aspek Derajat Desentralisasi

Berdasarkan hasil perhitungan dan gambar grafik derajat desentralisasi Pemerintah Kota Manado, maka dapat dilihat dengan jelas bahwasanya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi tren fluktuatif, dimana selama tiga tahun terakhir, tahun 2020 menunjukkan nilai terendah sebesar 19,37% dan tahun 2019 nilai tertinggi sebesar 24,61%, sehingga tahun 2021 nilai rasio mengalami kecenderungan kenaikan yakni 21,99% dibandingkan tahun 2020. Artinya dari total pendapatan

daerah, setiap tahunnya kontribusi pendapatan asli daerah menunjukkan nilai positif dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021.

Faktor utama penyebab menurunnya nilai rasio derajat desentralisasi dua tahun terakhir, terutama di tahun 2020 yakni kondisi pandemic Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya aktivitas masyarakat melalui permberlakuan social distancing yang tentunya mempengaruhi perputaran ekonomi Kota Manado. Rendahnya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah terutama pada sector jasa dan perdagangan akibat kondisi pandemic dan larangan-larangan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam membatasi aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, nilai rasio derajat desentralisasi Kota Manado tahun 2019, 2020 dan 2021 jika bandingkan dengan standar rasio derajat desentralisasi yakni kriteria yang dibuat oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri (Tan, 2010) maka tahun 2019 sebesar 24.61% masuk dalam katogori kriteria sedang (Nilai rasio antara 20,1% s/d 30%), tahun 2020 sebesar 19.37% masuk dalam kategori kriteria kurang (Nilai rasio antara 10,1 s/d 20%) dan tahun 2021 nilai rasio sebesar 21.99% masuk dalam kategori kriteria sedang ((Nilai rasio antara 20,1% s/d 30%).

Makin tinggi nilai rasio ini menunjukkan kemampuan daerah didalam mendominasi penerimaan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Peningkatan PAD ini terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat, hal ini juga mengindikasi bahwasanya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Manado yang terus tumbuh dan mengalami kenaikan ditahun 2021 seiring dengan

pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19. Dengan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat dan peredaran uang dimasyarakat, menyebabkan penggunaan fasilitas dan pelayanan pemerintah terlaksana dengan maksimal. Besarnya arus investasi serta tumbuhnya usaha-usahan baru menyebabkan sumber-sumber penerimaan asli daerah, pajak, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami peningkatan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi, maka akan otomatis dapat meningkatkan jumlah sumber Pendapatan Asli Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki peran didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-programnya, sehingga kontribusi ini juga akan meningkatkan porsi PAD dalam total pendapatan daerah. Dengan tren yang selalu mengalami peningkatan, diharapkan pemerintah daerah Kota Manado dapat melaksanakan otonomi daerah seperti yang telah diamantkan dalam undang-undang otomi daerah, sehingga dengan daerah yang otonom mampu melaksanakan kegiatan pemerintahannya dengan berupaya semaksimal mungkin menggali dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Berdsarkan tren grafik tersebut, juga memberikan peluang dan harapan yang optimis ditahun-tahun mendatang dalam upaya lebih meningkatkan potensi daerahnya menuju dareah yang lebih maju dan mandiri.

4.3.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Ditinjau Dari Aspek Ketergantungan Keuangan Daerah

Dari perhitungan dan gambar grafik ketergantungan keuangan daerah, maka diperoleh data tentang nilai rasio kebergantungan keuangan daerah terhadap

dana dari pemerintah pusat dan propinsi. Ditahun 2019 diperoleh nilai rasio sebesar 66,75%, ditahun 2020 sebesar rasionya yakni 72,82%, dan ditahun 2021 sebesar 69.83%.

Besarnya rasio ini mengandung makna kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado ditinjau dari aspek ketergantungan keuangan daerah ditahun 2019 dengan nilai rasio sebesar 66,75% artinya dari total pendapatan daerah, sebesar 66,75% masih bergantung dari dana transfer provinsi dan pusat, artinya dari keseluruhan kegiatan pemerintahan daerah Kota Manado 66,75% dibiayai oleh dana transfer dari provinsi dan pusat selebihnya menggunakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, hal ini juga berlaku untuk tahun 2020 dan tahun 2021.

Kecenderungan didalam menggunakan dana yang lebih besar berasal dari pemerintah pusat dan provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi dari aliran dana pemerintah pusat dan provinsi. Daerah belum mampu untuk mendiri dan tidak dapat membiayai kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan dana yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini terjadi akibat masih rendahnya kemampuan daerah didalam menggali sumber-sumber pendapatan asli darah, dan masih rendahnya tingkat perputaran keuangan dan aktivitas bisnis didaerah tersebut. Daya konsumtif masyarakat yang masih telalu tinggi, lambannya sektor ekonomi ril dalam menumbuh kembangkan usahanya serta hal-hal lianyannya yang juga mempengaruhi kemampuan daerah didalam menghasilkan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Nilai rasio ketergantungan daerah Kota Manado tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 masing-masing senilai 66.75%, 72.82%, dan 69.83%. nilai rasio tersebut menunjukkan angka yang relative tinggi, dimana standar rasio yang berlaku umum menunjukkan Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010 : 142)

Makin tinggi nilai rasio ini, mengindikasikan makin tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah dareah terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam hal pengalokasian dana. Dari gambar grafik juga menjelaskan tren tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi setiap tahunnya. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tren menunjukkan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini menunjukkan sinyal positif pemerintah untuk lebih mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Walaupun upaya tersebut masih tergolong kategori tinggi yakni masih berkisar di angka 90% tingkat ketergantungannya, tetapi hal ini menjadi langkah opsi yang positif yang ditunjukan oleh pemirntah daerah Kota Manado. Penurunan ini diharapkan dapat terus berlangsung ditahun-tahun berikutnya agar dengan lebih meningkatkan kinerjanya tertama didalam pengelolaan sumber daya daerah secara maksimal, efektif dan seefisien mungkin

4.3.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Ditinjau Dari Aspek Kemandiririna Daerah

Dari perhitungan dan gambar grafik kemandirian daerah Kota Manado, maka dapat diketahui besarnya rasio kemandirian daerah tahun 2019 adalah 33,42%, untuk tahun 2020 sebesar 24,96% dan tahun 2021 sebesar 28,60%. Nilai rasio kemandirian tersebut jika dibandingkan dengan standar rasio menurut Halim (2001:168) maka tahun 2019 sebesar 33,24% masuk dalam kriteria Konsultatif dengan kemampuan keuangan daerah yang rendah. Tahun 2020 sebesar 24.96% masuk dalam kriteria Intruktif dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat rendah. Sedangkan tahun 2021 sebesar 28,60% masuk dalam kriteria Konsultatif dengan kemampuan keuangan daerah yang rendah.

Besarnya rasio ini memberikan penjelasan tentang kemandirian daerah Pemerintah Kota Manado bahwasanya seberapa besar pemerintah daerah dapat dengan mandiri membiayai kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan dana yang bersumber dari PAD. Daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki tanpa bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi atau dari sumber pinjaman daerah lainnya. Daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerahnya dengan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan ditandai tingginya pertumbuhan penduduk, sektor bisnis yang beragam dan memiliki prospek yang baik, serta laju investasi yang tinggi didalam membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat baik melalui ekonomi mikro dan makro.

Gambar grafik juga menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah setiap tahunnya mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Tren ini memberikan indikasi bahwasanya Pemerintah Kota Manado cenderung berupaya meningkatkan kemandirian dareahnya dengan berupaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Dareah, walaupun angka tersebut masih telalu kecil jika dibandingkan dengan besarnya jumlah penerimaan yang besumber dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun demikian itikat Pemerintah Daerah didalam meningkatkan kemandirian sudah ditunjukan dalam tiga tahun terakhir, dan menjadi langkah optimis untuk terus untuk naik ditahun ke tiga atau tahun 2021 seiring dengan perbaikan ekonomi di daerah pasca pandemic covid-19.

4.3.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Ditinjau Dari Aspek Keserasian Belanja

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi keserasian belanja mengidikasikan bahwa Pemerintah Dareah Kota Manado lebih dominan menggunaan dananya untuk membelajakan kepentingan operasional dibanding belanja modal. Hasil analisis rasio belanja operasi yang cakup belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, jika bandingkan dengan total belanja daerah yakni tahun 2019 rasio belanja operasi sebesar 79.08% dari total belanja, tahun 2020 rasio belanja operasi sebesar 71.20% dan tahun 2021 rasio belanja operasi sebesar 83.18%. nilai rasio tersebut jika diperhatikan menunjukan tren yang fluktuatif tetapi dengan kecenderungan mengalami peningkatan di tahun terakhir.

Semakin tinggi nilai rasio belanja operasi setiap tahunnya, menujukan semakin besarnya penggunaan belanja daerah ke kebutuhan operasional dan

konsumtif. Kondisi ini memberikan penjelasan bahwasanya Pemerintah Kota Manado lebih cenderung menggunakan anggaran belanjanya untuk kegiatan operasionalnya yang sifatnya konsumtif dan masa manfaat hanya dapat dinikmati dalam satu tahun, dibanding dengan penggunaan dana yang sifatnya investasi dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Jika ditinjau nilai rasio belanja modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2019 yakni sebesar 14,97%, tahun 2020 sebesar 9.65% dan tahun 2021 sebesar 13.14%. nilai rasio belanja modal tersebut jika diperhatikan menunjukan nilai rasio fluktuatif dengan kecenderungan mangalami peningkatan di tahun 2021. Namun demikian nilai rasio tersebut masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan perkembangan pembangunan di Kota Manado realtif tidak banyak, makin rendah rasio belanja modal maka relative sedikit program pembiayaan pembangunan di Kota Manado. Belanja modal memiliki nilai investasi dan masa manfaat yang lebih lama terutama didalam menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat melalui pengadaan fasilitas pelayanan yang lebih memadai, dukungan infrastruktur yang baik serta hal-hal lain yang dapat memajukan ekonomi masyarakat yang juga nantinya akan berimbas kepada meningkatnya sejumlah item-item penerimaamaan asli daerah baik dalam bentuk pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Oleh karena itu, nilai belanja operasi Kota Manado masih tergolong sangat besar jika dibandingkan belanja modal, baik tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2020. Angka realiasi yang fluktuaif selama tiga tahun terakhir dengan kecenderungan mengalami kenaikan ditahun terakhir, namun angka-angka

tersebut untuk rasio belanja operasi masih tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal. Tentu faktor-faktor pandemic covid juga salah satu faktor yang turut memberikan kontribusi besarnya nilai belanja operasional tahun 2020 dan 2021, walaupun di tahun 2021 terus mengalami perbaikan rasio ke nilai yang lebih positif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado jika ditinjau dari perpektif Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih tergolong stagnan. Hal ini didasarkan pada lima indikator rasio tahun 2019, 2020 dan 2021.
2. Derajat desentralisasi Pemerintah Kota Manado masih tergolong rendah, Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat dan provinsi masih tergolong tinggi, tingkat kemandirian daerah yang masih tergolong dalam kriteria kurang, dan keserasian belanja daerah yang lebih didominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal. Dengan jumlah PAD yang masih rendah, tapi nilai positif masih terjadi ditahun 2021.
3. Dari semua pengukuran menunjukan bahwa faktor utama penyebab nilai rasio mengalami fluktuasi dengan nilai rasio terendah tahun 2020 disebabkan oleh kondisi pandemic Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat dibatasi dan sangat berpengaruh terhadap daya beli dan perputaran ekonomi Kota Manado.
4. Sepinya pengunjung atau konsumen baik sector jasa dan perdagangan menyebabkan nilai PAD Kota Manado tahun 2020 mengalami penurunan dan nilai belanja konsumtif di tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang signifikan dibanding belanja modal, karena adanya kebijakan pergeseran anggaran yang

lebih berorientasi pada pengendalian Covid 19 pada tahun 2020 dan tahun 2021. Sehingga tahun 2021 nilai rasio dari masing-masing indicator pengukuran Kembali menunjukan nilai positif disbanding tahun 2020, sebagai tanda adanya perbaikan ekonomi dalam masa pemulihan ekonomi dimasa pandemic covid-19.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Manado untuk strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pasca pandemic Covid-19 dengan inovasi-inovasi yang dapat menggerakkan sector ekonomi produktif dan kegiatan promosi-promosi daerah dengan program kemitraan dengan para investor untuk menwarkan peluang kerjasama dalam menggali dan meningkatkan potensi daerah yang lebih maju dan mandiri.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Terutama tentang sejauhmana strategi pemerintah daerah didalam meningkatkan ekonomi daerahnya dengan ditandai dengan peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah dalam menujang kemandirian keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. BPFE: Yogyakarta.
- , 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Basri, Yuswar Zainul Dan Muulyadi Subir. 2003. *Keuangan Negara Dan Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT. Grafindo Persada : Jakarta
- Darsono, dan Ashari. 2009. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Andi, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UUP AMP YKPN: Yogyakarta.
- , 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Tiga*. Salemba Empat: Jakarta.
- , 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanafi, Mamduh M dan Halim, Abdul. 2009. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi. 4*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja. Grafindo Persada, Jakarta
- Karti Kahadi, Hans. 2012. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empa
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mamhudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- , 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mulyadi. 2009. *Sistem Terpadu Kinerja Personel Berbasis Balances Scorecard*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- , 2002. *Auditing. Buku satu*. Salemba Empat : Jakarta
- Prastowo, Dwi dan Rifka Juliaty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Unit Penerbit & Percetakan AMP YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung

----- 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Tan, Syamsurijal. 2010. *Perencanaan Pembangunan –Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Jambi

Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi

www.djpk.Kemenkeu.go.id/portal, di akses tanggal 23 April 2022

<https://www.manadokota.go.id/>, di akses tanggal 23 April 2022

tal data <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2019&provinsi...>

 Filter data

Jenis data

apbd

Tahun

2019

Wilayah

Semua Provinsi

Sub-wilayah

Semua Kab/Kota

SUBMIT

POSTUR APBD

Kota Manado

Tahun 2019

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2019, per 19 Mei 2022

 (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/csv?type=apbd&tahun=2019&provinsi=18&pemda=05>)

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.577,75 M	1.533,76 M	97.21
PAD	375,07 M	377,38 M	100.62
Pajak Daerah	288,51 M	301,64 M	104.55
Retribusi Daerah	47,76 M	27,03 M	56.60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,74 M	5,20 M	298.90
Lain-Lain PAD yang Sah	37,06 M	43,51 M	117.40

ortal data

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2019&provinsi...>

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
TKDD	1.053,91 M	1.023,72 M	97.14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.053,91 M	1.023,72 M	97.14
Pendapatan Lainnya	148,77 M	132,65 M	89.17
Pendapatan Transfer Antar Daerah	118,38 M	105,38 M	89.02
Pendapatan Hibah	30,39 M	27,27 M	89.75
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Daerah	1.828,45 M	1.623,08 M	88.77
Belanja Pegawai	686,31 M	633,57 M	92.32
Belanja Pegawai	686,31 M	633,57 M	92.32
Belanja Barang Jasa	550,91 M	649,93 M	117.97
Belanja Barang dan Jasa	550,91 M	649,93 M	117.97
Belanja Modal	472,19 M	242,93 M	51.45
Belanja Modal	472,19 M	242,93 M	51.45
Belanja Lainnya	119,04 M	96,65 M	81.19
Belanja Bunga	7,20 M	1,20 M	16.67
Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Hibah	30,98 M	44,59 M	143.92
Belanja Bantuan Sosial	44,00 M	46,56 M	105.81
Belanja Tidak Terduga	2,50 M	3,18 M	127.01
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Bantuan Keuangan	34,36 M	1,14 M	3.31
Surplus/(Defisit)	-250,70 M	-89,32 M	35.63
Pembiayaan Daerah	850,70 M	207,29 M	24.37
Penerimaan Pembiayaan Daerah	855,00 M	211,33 M	24.72

tal data

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2019&provinsi...>

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55,00 M	211,33 M	384.23
Pencairan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	800,00 M	0,00 M	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,30 M	4,03 M	93.75
Pembentukan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penyertaan Modal Daerah	4,30 M	1,80 M	41.88
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00 M	2,23 M	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0

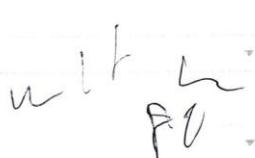
rtal data

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi...>

▼ Filter data

Jenis data
apbd

Tahun
2020

Wilayah
Semua Provinsi 

Sub-wilayah
Semua Kab/Kota

SUBMIT

POSTUR APBD

Kota Manado

Tahun 2020

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember TA 2020, per 22 Mei 2022

(<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/csv?type=apbd&tahun=2020&provinsi=18&pemda=05>)

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.640,29 M	1.351,65 M	82.40
PAD	443,61 M	261,76 M	59.01
Pajak Daerah	352,24 M	201,38 M	57.17
Retribusi Daerah	45,56 M	21,16 M	46.34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,74 M	2,98 M	171.28
Lain-Lain PAD yang Sah	44,07 M	36,24 M	82.23

rtal data

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi...>

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	775,00 M	343,94 M	44.38
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55,00 M	117,97 M	214.49
Pencairan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	720,00 M	225,97 M	31.38
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,60 M	4,82 M	133.76
Pembentukan Dana Cadangan	0,00 M	0,00 M	0
Penyertaan Modal Daerah	3,60 M	3,60 M	100.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00 M	1,22 M	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0

rtal data <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=18&pemda=05>

Filter data

Jenis data
apbd

Tahun
2021

Wilayah
Semua Provinsi

Sub-wilayah
Semua Kab/Kota

SUBMIT

POSTUR APBD

Kota Manado

Tahun 2021

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2021, - data diterima SIKD per 22 Mei 2022

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/csv?type=apbd&tahun=2021&provinsi=18&pemda=05>

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.487,09 M	1.330,53 M	89.47
PAD	440,19 M	292,64 M	66.48
Pajak Daerah	353,68 M	239,87 M	67.82
Retribusi Daerah	46,49 M	19,58 M	42.13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,74 M	3,43 M	72.42
Lain-Lain PAD yang Sah	35,28 M	29,74 M	84.30

rtai data

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi...>

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
TKDD	1.048,35 M	984,24 M	93.88
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.048,35 M	984,24 M	93.88
Pendapatan Lainnya	148,33 M	105,65 M	71.23
Pendapatan Transfer Antar Daerah	114,28 M	64,42 M	56.37
Pendapatan Hibah	34,05 M	41,23 M	121.10
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Daerah	1.871,69 M	1.519,74 M	81.20
Belanja Pegawai	684,27 M	582,51 M	85.13
Belanja Pegawai	684,27 M	582,51 M	85.13
Belanja Barang Jasa	642,36 M	499,49 M	77.76
Belanja Barang dan Jasa	642,36 M	499,49 M	77.76
Belanja Modal	385,78 M	146,70 M	38.03
Belanja Modal	385,78 M	146,70 M	38.03
Belanja Lainnya	159,28 M	291,03 M	182.71
Belanja Bunga	8,00 M	1,25 M	15.57
Belanja Subsidi	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Hibah	91,28 M	87,53 M	95.90
Belanja Bantuan Sosial	53,35 M	75,27 M	141.08
Belanja Lainnya	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Tidak Terduga	4,50 M	125,86 M	2.796.82
Belanja Bagi Hasil	0,00 M	0,00 M	0
Belanja Bantuan Keuangan	2,16 M	1,13 M	52.43
Surplus/(Defisit)	-231,40 M	-168,09 M	72.64
Pembiayaan Daerah	771,40 M	339,12 M	43.96

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
TKDD	947,39 M	929,09 M	98.07
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	947,39 M	929,09 M	98.07
Pendapatan Lainnya	99,50 M	108,80 M	109.35
Pendapatan Transfer Antar Daerah	71,41 M	94,04 M	131.68
Pendapatan Hibah	0,00 M	14,77 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28,09 M	0,00 M	0.00
Belanja Daerah	1.598,95 M	1.303,41 M	81.52
Belanja Pegawai	701,97 M	612,46 M	87.25
Belanja Pegawai	701,97 M	612,46 M	87.25
Belanja Barang Jasa	566,70 M	471,71 M	83.24
Belanja Barang dan Jasa	566,70 M	471,71 M	83.24
Belanja Modal	286,97 M	171,27 M	59.68
Belanja Modal	286,97 M	171,27 M	59.68
Belanja Lainnya	43,31 M	47,98 M	110.77
Belanja Bunga	7,40 M	9,33 M	126.06
Belanja Hibah	13,94 M	19,25 M	138.15
Belanja Bantuan Sosial	12,55 M	7,12 M	56.76
Belanja Tidak Terduga	9,43 M	12,27 M	130.20
Surplus/(Defisit)	-111,87 M	27,12 M	-24.24
Pembentukan Modal Daerah	541,83 M	188,49 M	34.79
Penerimaan Pembentukan Modal Daerah	572,04 M	200,48 M	35.32
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00 M	1,56 M	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	572,04 M	200,48 M	35.05
Pengeluaran Pembentukan Modal Daerah	30,20 M	13,55 M	44.86
Penyertaan Modal Daerah	8,60 M	0,00 M	0.00

18/12/2019

lemlit.ichsan/lemlit/cetak-surat-penelitian-mahasiswa/1797/

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1910/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Utara

di,-

Manado

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Riani Claurenza Polontalo
NIM : E1116112
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 Desember 2019
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST., SE
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KOTA MANADO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Balai Kota No.1 Lt. 1 Tikala Ares Telepon (0431) 851103
 Kode Pos 95127

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan surat permohonan penelitian yang telah kami terima dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo, Nomor 1910/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2019 dengan menerangkan nama mahasiswa dibawah ini.

Nama	:	Sitti Riani Claurenza Polontalo
NIM	:	E111612
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi	:	S1 - Akuntansi
Judul Penelitian	:	Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Sulawesi Utara

Mahasiswa diatas benar telah melaksanakan penelitian dengan baik di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

Demikian surat penyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.





SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 081/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sitti Riani Claurenza Polontalo
NIM : E1116112
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

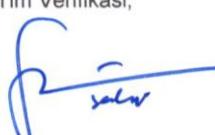
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan



Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,



Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

 **turnitin** Similarity Report ID: oid:25211:17990957

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI - S. R. Claurenza Polontalo revis i.docx	Sitti Riani Claurenza Polontalo
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
8825 Words	59227 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
57 Pages	219.4KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jun 1, 2022 10:28 AM GMT+8	Jun 1, 2022 10:31 AM GMT+8

● 26% Overall Similarity
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 12% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

[Summary](#)

 **Similarity Report ID:** oid:25211:17990957

● **26% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

• 26% Internet database	• 12% Publications database
• Crossref database	• Crossref Posted Content database
• 1% Submitted Works database	

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	corongmanado.com	2%
	Internet	
2	id.wikipedia.org	2%
	Internet	
3	id.scribd.com	2%
	Internet	
4	eprints.polsri.ac.id	2%
	Internet	
5	radisahara.staff.gunadarma.ac.id	1%
	Internet	
6	repository.widyatama.ac.id	1%
	Internet	
7	teguhariy.blogspot.com	<1%
	Internet	
8	123dok.com	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

 turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:17990957

9	nanopdf.com	<1%
	Internet	
10	hargabulanini.com	<1%
	Internet	
11	repository.uksw.edu	<1%
	Internet	
12	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
13	docplayer.info	<1%
	Internet	
14	id.123dok.com	<1%
	Internet	
15	morotailumbungilmu.blogspot.com	<1%
	Internet	
16	jurnal.unived.ac.id	<1%
	Internet	
17	repositori.unsil.ac.id	<1%
	Internet	
18	ejurnal.latansamashiro.ac.id	<1%
	Internet	
19	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
20	jurnal.pcr.ac.id	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

 turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:17990957

21	docobook.com	<1%
	Internet	
22	mafiadoc.com	<1%
	Internet	
23	repository.uki.ac.id	<1%
	Internet	
24	scribd.com	<1%
	Internet	
25	eprints.perbanas.ac.id	<1%
	Internet	
26	docshare.tips	<1%
	Internet	
27	media.neliti.com	<1%
	Internet	
28	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
29	rangkuman-sap.blogspot.com	<1%
	Internet	
30	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
	Internet	
31	vdocuments.site	<1%
	Internet	
32	es.slideshare.net	<1%
	Internet	

[Sources overview](#)

 **turnitin** Similarity Report ID: oid:25211:17990957

33	repo.iain-tulungagung.ac.id	<1 %
	Internet	
34	core.ac.uk	<1%
	Internet	
35	adoc.pub	<1%
	Internet	